

**TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DALAM
PENGAWASAN TERHADAP PEREDARAN OBAT ILEGAL DITINJAU
DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG
KESEHATAN**

SKRIPSI



**Skripsi ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Nilai Sekaligus Gelar Sarjana Hukum**

ALBETUS KARO ARU

NIM. 2022111081

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN SOSIAL HUMANIORA
UNIVERSITAS FLORES**

ENDE

2026

LEMBAR PERSETUJUAN

**TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DALAM
PENGAWASAN TERHADAP PEREDARAN OBAT ILEGAL DITINJAU
DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG
KESEHATAN**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

DISUSUN OLEH

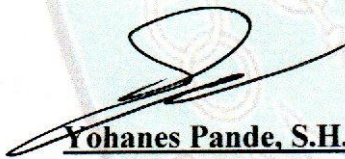
ALBETUS KARO ARU

NIM. 2022111081

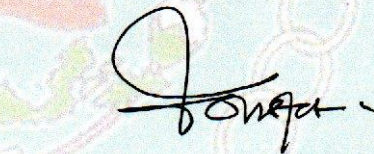
Disetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II


Yohanes Pande, S.H., M.H

NUPTK: 5539752653130110

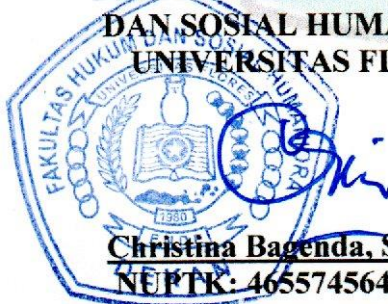

Dr. Alfonsus Fa, S.H., M.Hum

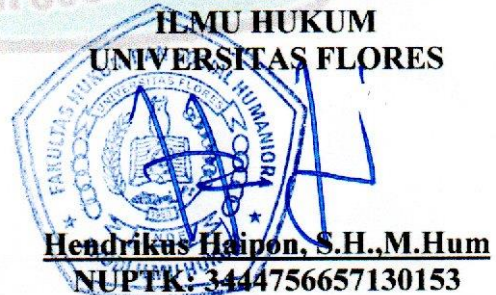
NUPTK: 3861754655130102

Mengetahui:

**DEKAN FAKULTAS HUKUM
DAN SOSIAL HUMANIORA
UNIVERSITAS FLORES**

**KETUA PROGRAM STUDI
ILMU HUKUM
UNIVERSITAS FLORES**


Christina Bagenda, S.H., M.H
NUPTK: 4655745646230132


Hendrikus Haipon, S.H., M.Hum
NUPTK: 3444756657130153

LEMBAR PENGESAHAN
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DALAM
PENGAWASAN TERHADAP PEREDARAN OBAT ILEGAL DITINJAU
DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG
KESEHATAN

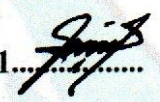
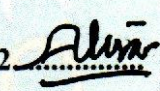
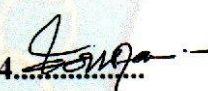
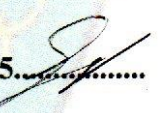
SKRIPSI

DISUSUN OLEH:
ALBETUS KARO ARU
NIM. 2022111081

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM DISAHKAN

Pada Hari : Jumat
Tanggal : 21 Agustus 2026

DEWAN PENGUJI SKRIPSI :

- | | | |
|---|--------------|--|
| 1. Bernadus Basa Kelen, S.H.,M.Hum | (Ketua) | 1.  |
| 2. Maria Alberta Liza Quintarti, S.H.,M.Hum | (Sekretaris) | 2.  |
| 3. Karolus Charlaes Bego, S. H.,M.Sc | (Anggota) | 3.  |
| 4. Dr. Alfonsus Fa, S.H.,M.Hum | (Anggota) | 4.  |
| 5. Yohanes Pande, S.H.,M.H | (Anggota) | 5.  |

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum Dan Sosial Humaniora
Universitas Flores


Christina Bagenda, S.H.,M.H
NUPTK: 4655745646230132

Ketua
Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Flores


Hendrikus Harpon, S.H.,M.Hum
NUPTK: 3444756657130153

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Albetus Karo Aru
Nim : 2022111081
Fakultas : Hukum dan Sosial Humaniora
Perguruan tinggi : Universitas Flores

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Ende Dalam Pengawasan Terhadap Peredaran Obat Ilegal Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan”**, dengan ini secara keseluruhan adalah hasil karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang rujuk sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima hukuman/sanksi atas perbuatan saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ende, 21 Agustus 2026



Albetus Karo Aru
NIM: 2022110226

MOTTO

"Di tanah yang keras, akar yang kuatlah yang bertahan,

INGATLAH!!!

Luka hari ini adalah pelajaran, bukan akhir dari perjalanan"

Albetus Karo Aru, 2026

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, penulis panjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat, rahmat, penyertaan, dan pertolongan-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis menyadari bahwa keberhasilan ini tidak terlepas dari doa, dukungan, kasih sayang, pengorbanan, bimbingan, serta motivasi dari berbagai pihak.

Dengan segala kerendahan hati, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa hadir, menyertai, dan melindungi penulis serta memberikan kekuatan, kesehatan, kesabaran, keteguhan hati, dan kemudahan dalam menghadapi setiap tantangan hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
2. Orang tua tercinta, Bapak Albertus Aru dan Mama Anastasia Sani, yang menjadi sumber kekuatan, inspirasi, dan motivasi terbesar bagi penulis. Terima kasih atas setiap doa, kasih sayang, pengorbanan, dukungan, perhatian, serta perjuangan yang telah diberikan selama penulis menempuh pendidikan hingga menyelesaikan skripsi ini.
3. Terima kasih kepada Mama, yang selalu memberikan semangat dan mengajarkan penulis untuk tetap optimis dalam menghadapi setiap tantangan. “Tantangan apa pun harus dihadapi dengan optimis. Semangat, kamu pasti bisa.” Kalimat sederhana dari Mama selalu memberikan kekuatan kepada penulis untuk tetap berusaha dan tidak mudah menyerah.

4. Opa, Oma, serta keluarga besar di Boanio, dan Opa, Oma serta keluarga besar di Welamosa, yang selalu memberikan doa, dukungan, perhatian, semangat, dan motivasi kepada penulis selama menjalani proses pendidikan hingga menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas kasih sayang, kepedulian, dan segala bentuk dukungan yang telah diberikan kepada penulis. Kehadiran keluarga menjadi kekuatan bagi penulis dalam menghadapi berbagai tantangan selama menempuh pendidikan.
5. Om dan Bibi, yang telah menerima, merawat, memberikan tempat tinggal, serta mendampingi penulis sejak menempuh pendidikan SMP hingga berhasil menyelesaikan pendidikan sarjana. Terima kasih atas kasih sayang, perhatian, pengorbanan, doa, dukungan, nasihat, dan motivasi yang selalu diberikan kepada penulis. Kebaikan dan ketulusan Om dan Bibi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjalanan pendidikan penulis dan akan selalu penulis kenang.
6. Dosen Pembimbing I, Bapak Yohanes Pande, S.H., M.H., yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan, memberikan koreksi, masukan, serta motivasi kepada penulis dalam proses penyusunan hingga penyelesaian skripsi ini. Terima kasih atas kesabaran dan ilmu yang telah diberikan kepada penulis.
7. Dosen Pembimbing II, Bapak Dr. Alfonsus Fa, S.H., M.H., yang telah dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan, arahan, koreksi, serta masukan yang berharga kepada penulis sehingga skripsi ini dapat

diselesaikan dengan baik. Terima kasih atas waktu, perhatian, dan ilmu yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi ini.

8. Kakak dan adik tersayang, yang selalu hadir dalam perjalanan hidup dan pendidikan penulis. Terima kasih atas kasih sayang, perhatian, dukungan, semangat, dan motivasi yang diberikan dengan cara masing-masing. Kehadiran kalian menjadi bagian penting dan berharga dalam perjalanan penulis hingga berhasil menyelesaikan pendidikan sarjana.
9. Sahabat dan teman seperjuangan, Jon dan Gilang, yang telah menemani penulis sejak awal perjalanan perkuliahan hingga sampai pada tahap penyelesaian skripsi ini. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, bantuan, semangat, dan motivasi yang telah diberikan.
10. Kamu hebat. Kamu bisa bekerja mandiri, mencari uang sampingan, dan tetap tidak menyerah. Orang lain belum tentu bisa seperti kamu.” Kalimat yang pernah disampaikan Jon dan Gilang menjadi penyemangat bagi penulis untuk tetap bekerja keras, mandiri, dan tidak mudah menyerah dalam menghadapi berbagai tantangan selama menjalani pendidikan.
11. Diri sendiri, Albertus Karo Aru, terima kasih telah berjuang, bertahan, dan tidak menyerah dalam menghadapi berbagai tantangan selama proses pendidikan dan penyelesaian skripsi ini. Terima kasih telah terus melangkah meskipun banyak rintangan yang harus dilewati. Setiap proses, perjuangan, kegagalan, dan keberhasilan telah menjadi bagian berharga dalam perjalanan hidup. Semoga pencapaian ini menjadi awal untuk melangkah

menuju masa depan yang lebih baik serta menjadi kebanggaan bagi orang tua, keluarga, dan semua orang yang telah mendukung.

KATA PENGANTAR

Pertama-tama peneliti mengucapkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, dimana dengan merangkai kata demi kata membentuk kalimat, sehingga dapat menyusun karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang semuanya tidak luput dari tuntutan dan anugerah sang pencipta yang patut peneliti syukuri sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Ende Dalam Pengawasan Terhadap Peredaran Obat Ilegal Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan”**, yang merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi dalam memperoleh gelar sarjana pada fakultas hukum universitas flores.

Namun demikian peneliti sangat sadar akan kekurangan dan keterbatasan yang terdapat dalam penelitian skripsi ini, sehingga peneliti banyak mengharapkan kritikan dan masukan yang berarti dari Bapak/Ibu Dosen serta para pembaca sekalian, demi kesempurnaan skripsi ini.

Rasa terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas dedikasi yang peneliti tujukan kepada:

1. Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Flores (YAPERTIF), Bapak Dr. Laurentius D. Gadi Djou, Akt, yang sudah berjuang dan memberikan kontribusi yang luar biasa untuk memajukan pendidikan di Universitas Flores.
2. Rektor Universitas Flores, Bapak Dr. Wilibrodus Lanamana, S.E.,M.M.A, yang telah memberikan pengaruh dan kontribusi yang besar demi perkembangan pendidikan di Universitas Flores.

3. Ibu Christina Bagenda, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora dan banyak memberikan masukan bagi penulis, dan juga mendorong penulis untuk selalu semangat menyelesaikan tugas akhir ini.
4. Bapak Agustinus F. Paskalino Dadi, S.Fil., M.Hum sebagai Wakil Dekan I Bidang Akademik.
5. Ibu Ernesta Arita Ari, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Kepegawaian dan Keuangan yang telah memberikan kemudahan dalam proses administrasi.
6. Ibu Gratiana sama S.Pd., M.Hum, selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan.
7. Bapak Hendrikus Haipon S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum yang dengan tulus ikhlas membimbing sekaligus memberikan nasihat kepada kami semua dalam mengerjakan tugas akhir ini.
8. Ibu Sumirahayu Sulaiman S.H., M.Hum, selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum yang dengan tulus ikhlas mengarahkan, membimbing sekaligus memberikan semangat kepada kami semua dalam mengerjakan tugas akhir ini.
9. Bapak Yohanes Pande, S.H.,M.H., selaku pembimbing I, yang dengan tulus hati tak henti-hentinya memberikan semangat dan bimbingan kepada peneliti demi terselesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.
10. Bapak Dr. Alfonsus Fa, S.H.,M,Hum., selaku Dosen pembimbing II, yang dengan tulus hati tak henti-hentinya memberikan semangat dan bimbingan kepada peneliti demi terselesaikan skripsi ini tepat pada waktunya

11. Dosen Program Studi Ilmu Hukum, yang dengan sabar dan semangat membagi ilmu dan pengetahuannya bagi kami semua. Kami tidak bisa membalas jasa Bapak/Ibu Dosen, hanya seuntai doa yang kami panjatkan untuk Bapak dan Ibu Dosen semuanya, semoga diberikan kesehatan dan limpahan rejeki yang baik.
12. Ibu Kristina Bunga S.H selaku Kepala Tata Usaha Fakultas Hukum Dan Sosial Humaniora, yang selama ini banyak membantu dan melancarkan proses administrasi dan juga selalu memberikan dorongan bagi peneliti untuk menyelesaikan studi tepat waktu.
13. Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora yang selama ini melayani dan juga membantu kami dalam proses administrasi dengan baik dan tulus ikhlas.
14. Harapan peneliti semoga skripsi ini berguna bagi para pembaca umumnya, dan khususnya Akademisi Hukum, dan teman-teman yang berkecimpung dalam bidang hukum, sehingga dapat menambah wawasan dan khasanah keilmuan, khususnya Ilmu Hukum.

Ende, 21 Agustus 2026

Hormat Peneliti



Albetus Karo Aru
NIM: 2022110226

ABSTRAK

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DALAM PENGAWASAN TERHADAP PEREDARAN OBAT ILEGAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN DISUSUN OLEH ALBETUS KARO ARU, NIM: 2022110226

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketentuan Pasal 138 ayat (6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang mewajibkan Pemerintah Daerah untuk membina, mengatur, mengendalikan, dan mengawasi peredaran sediaan farmasi di wilayahnya. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan kasus peredaran obat ilegal di Kabupaten Ende, sebagaimana terbukti dalam Putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor 58/Pid.Sus/2025/PN End, di mana terdakwa mengedarkan 1.000 butir pil berlogo "Y" tanpa izin edar melalui transaksi digital menggunakan WhatsApp, DANA, dan J&T. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Ende dalam pengawasan terhadap peredaran obat ilegal serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat efektivitas pengawasan tersebut.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Ende dan Satpol PP Kabupaten Ende, serta data sekunder yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan dokumen hukum terkait. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, studi kepustakaan, dan studi dokumentasi. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tanggung jawab pengawasan oleh Pemerintah Kabupaten Ende belum berjalan secara efektif. Upaya pengawasan yang dilakukan meliputi inspeksi rutin ke apotek dan toko obat, koordinasi antar-instansi antara Dinas Kesehatan, Loka POM Ende, dan Polres Ende, serta edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Namun, efektivitasnya masih terkendala oleh faktor internal berupa keterbatasan tenaga pengawas, anggaran, serta sarana dan prasarana. Sementara itu, faktor eksternal meliputi lemahnya koordinasi antar-instansi yang masih bersifat insidental, rendahnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan temuan obat ilegal, serta maraknya modus peredaran berbasis digital yang sulit dideteksi. Kasus pil "Y" menjadi bukti nyata bahwa pengawasan preventif masih lemah, terutama terhadap transaksi obat secara daring.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan upaya strategis berupa penguatan sumber daya dan sarana pengawasan, peningkatan koordinasi dan sistem informasi terintegrasi antar-instansi, penguatan edukasi dan penyediaan saluran pengaduan bagi masyarakat, serta pengawasan terhadap peredaran obat berbasis digital melalui kerja sama dengan platform digital dan penegakan hukum yang tegas sesuai Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Pemerintah dan Pengawasan Obat Ilegal

ABSTRACT

ALBETUS KARO ARU. 2026. "THE RESPONSIBILITY OF ENDE REGENCY GOVERNMENT IN SUPERVISION OF ILLEGAL DRUG DISTRIBUTION REVIEWED FROM LAW NUMBER 17 OF 2023 CONCERNING HEALTH." THESIS, LAW STUDY PROGRAM, FACULTY OF LAW AND SOCIAL HUMANITIES, UNIVERSITY OF FLORES.

This research is motivated by the provisions of Article 138 paragraph (6) of Law Number 17 of 2023 concerning Health which mandates Local Government to foster, regulate, control, and supervise the distribution of pharmaceutical preparations in its territory. However, in practice, cases of illegal drug distribution are still found in Ende Regency, as evidenced in Ende District Court Decision Number 58/Pid.Sus/2025/PN End, where the defendant distributed 1,000 pills marked with the letter "Y" without marketing authorization through digital transactions using WhatsApp, DANA, and J&T. This study aims to analyze the implementation of Ende Regency Government's responsibility in supervising illegal drug distribution and to identify factors that hinder the effectiveness of such supervision.

This research employs empirical legal research with a sociological juridical approach. Data sources consist of primary data obtained through interviews with Ende Regency Health Office and Ende Regency Civil Service Police Unit, as well as secondary data sourced from laws and regulations, books, journals, and related legal documents. Data collection techniques include interviews, literature study, and document analysis. Data were analyzed using descriptive qualitative method.

The results show that the implementation of supervisory responsibility by Ende Regency Government has not been effective. Supervisory efforts undertaken include routine inspections of pharmacies and drug stores, inter-agency coordination between Health Office, Ende Local POM, and Ende Resort Police, as well as education and socialization to the community. However, its effectiveness is still constrained by internal factors such as limited supervisory personnel, budget, and facilities and infrastructure. Meanwhile, external factors include weak inter-agency coordination which remains incidental, low public participation in reporting findings of illegal drugs, and the rise of digitally-based distribution modes that are difficult to detect. The "Y" pill case is concrete evidence that preventive supervision remains weak, especially regarding online drug transactions.

This study concludes that strategic efforts are needed in the form of strengthening resources and supervisory facilities, improving coordination and integrated information systems between agencies, strengthening education and providing complaint channels for the public, as well as supervising digitally-based drug distribution through cooperation with digital platforms and firm law enforcement in accordance with Article 435 of Law Number 17 of 2023 concerning Health.

Keywords: Government Responsibility and Illegal Drug Supervision

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	x
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Ruang Lingkup Masalah	6
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Metode Penelitian.....	9
1.6 Sistematika Penulisan.....	13
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tanggung Jawab Pemerintah.....	15
2.2 Pengawasan	17
2.3 Tinjauan tentang Obat dan Peredaran Obat Ilegal.....	18

**BAB III TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KABUPATEN ENDE
DALAM PENGAWASAN TERHADAP PEREDARAN OBAT
ILEGAL**

3.1. Landasan Hukum Tanggung Jawab Pengawasan Pemerintah Daerah	21
3.2. Pelaksanaan Pengawasan oleh Pemerintah Kabupaten Ende.....	24
3.2.1 Upaya Pembinaan dan Pengawasan Langsung.....	24
3.2.2 Koordinasi Antar-Instansi.....	31
3.2.3 Edukasi dan Sosialisasi kepada Masyarakat.....	35
3.3. Analisis Tanggung Jawab Pengawasan dalam Kasus Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2025/PN End	39
3.3.1 Modus Peredaran dan Fakta Hukum Kasus.....	39
3.3.2 Refleksi Kasus terhadap Efektivitas Pengawasan Pemerintah Daerah.....	42
3.4. Evaluasi Pelaksanaan Tanggung Jawab Pengawasan di Kabupaten Ende	44
3.4.1. Kesesuaian Pelaksanaan dengan Ketentuan Undang-Undang	44
3.4.2. Dampak Pengawasan terhadap Perlindungan Kesehatan Masyarakat	47

**BAB IV FAKTOR PENGHAMBAT DALAM MELAKUKAN
PENGAWASAN TERHADAP PEREDARAN OBAT ILEGAL DI
KABUPATEN ENDE**

4.1 Faktor Internal (Sumber Daya dan Kelembagaan).....	51
4.1.1 Keterbatasan Sumber Daya Manusia dan Anggaran	51
4.1.2 Keterbatasan Sarana dan Prasarana Pendukung	54

4.2	Faktor Eksternal (Koordinasi, Masyarakat, dan Modus Kejahatan)	57
4.2.1	Lemahnya Koordinasi Antar-Instansi	57
4.2.2	Rendahnya Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat	60
4.2.3	Maraknya Modus Peredaran Obat Ilegal Berbasis Digital	63
4.3	Upaya Mengatasi Hambatan Pengawasan.....	66
4.3.1	Penguatan Sumber Daya dan Sarana Pengawasan	66
4.3.2	Peningkatan Koordinasi dan Sistem Informasi Terintegrasi	70
4.3.3	Penguatan Edukasi dan Partisipasi Masyarakat	73
4.3.4	Pengawasan Terhadap Peredaran Obat Berbasis Digital	76

BAB V PENUTUP

5.1	Kesimpulan.....	81
5.2	Saran.....	82

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN